

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**APATISME MASYARAKAT PADA KESADARAN HUKUM
DALAM PEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH**

(Analisis Kritis Lahirnya Sikap Apatis Masyarakat dalam Pengaruhnya Terhadap Kesadaran Hukum Pada Pengurusan Sertifikat Tanah di Desa Boludawa Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango dalam Prespektif Fenomenologis)

Oleh:


SALDIN
NIM. 221412060

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

PEMBIMBING I


PEMBIMBING II


Dr. Jusdin Puluhulawa, SH., M.Si
NIP. 19601010 198703 1 021


Dr. Sastro M. Wantu, SH., M. Si
NIP. 19660903 199603 1 001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan


ASMUM W. WANTU, S.Pd., M.Sc
NIP. 19780712 200501 2 004

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Yang Berjudul:

APATISME MASYARAKAT PADA KESADARAN HUKUM
DALAM PEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH

(Analisis Kritis Lahirnya Sikap Apatis Masyarakat dalam Pengaruhnya Terhadap Kesadaran Hukum Pada Pengurusan Sertifikat Tanah di Desa Boludawa Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango dalam Prespektif Fenomenologis)

Oleh

SALDIN

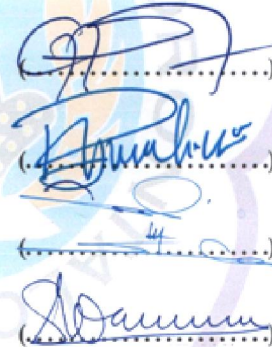
(Telah Dipertahankan Didepan Dewan Penguji)

Hari/Tanggal : Kamis 20 Juli 2017

Waktu : 13:00 WITA

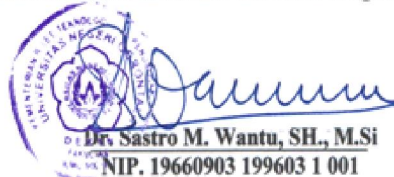
PENGUJI

1. Dr. Udin Hamim, S.Pd., SH., M.Si
NIP. 19760814 200212 1 001
2. Ramli Mahmud, S.Pd., MA
NIP. 19820503 201504 1 002
3. Dr. Jusdin Puluhulawa, SH., M.Si
NIP. 19601010 198703 1 021
4. Dr. Sastro M. Wantu, SH., M.Si
NIP. 19660903 199603 1 001



Gorontalo, 20 Juli 2017

Dekan Fakultas Ilmu Social Universitas Negeri Gorontalo



Dr. Sastro M. Wantu, SH., M.Si
NIP. 19660903 199603 1 001

ABSTRAK

Saldin. NIM: 221411064. 2017. Apatisme Masyarakat Pada Kesadaran Hukum Dalam Pemilikan Sertifikat Tanah (*Analisis Kritis Lahirnya Sikap Apatisme Masyarakat dalam Pengaruhnya Terhadap Kesadaran Hukum Pada Pengurusan Sertifikat Tanah di Desa Boludawa Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango dalam Prespektif Fenomenologis*). Skripsi. Atas bimbingan Bapak Dr. Jusdin Puluhulawa, SH., M.Si dan Bapak Dr. Sastro M. Wantu, SH., M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat Desa Boludawa dalam pengurusan pemilikan sertifikat tanah, hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi sehingga apatis dalam pengurusan kepemilikan sertifikat hak atas tanah, serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketidakpedulian masyarakat dalam pengurusan pemilikan sertifikat tanah. Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif deskriptif* dengan menggunakan pendekatan *fenomenologi*. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang secara tidak langsung untuk mendukung data primer. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *purposive sampling* dimana sampel yang diambil berdasarkan pertimbangan tertentu. Analisis data menggunakan analisa data model interaktif dengan tiga alur kegiatan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hukum dalam kaitannya dengan pengurusan sertifikat tanah dipahami bahwa sertifikat adalah alat untuk menyatakan hak kepemilikan tanah yang diakui oleh negara. Pada poin tersebut, masyarakat sangat memahami itu, tetapi dalam hal teknis lebih jauh serta konsekuensi-konsekuensi atas hak kepemilikan tanah, sepenuhnya membuat mereka takut untuk berkepentingan dengan urusan sertifikat tanah. Oleh Karena itu, maka peneliti menganggap pengetahuan hukum masyarakat masih sangat rendah. Faktor yang merupakan hambatan dalam pengurusan kepemilikan sertifikat tanah adalah faktor pelayanan, sosialisasi yang kurang, faktor ekonomi serta yang terpenting adalah lahirnya sifat apatisme warga masyarakat yang diwujudkan dengan ketidakpedulian sertifikat atas hak kepemilikan tanah. Upaya untuk mengatasi rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah adalah perlunya sosialisasi hukum bahwa pentingnya hak atas kepemilikan tanah dalam bentuk sertifikat, serta intensitasi penyuluhan yang terintegrasi. PRONAS adalah solusi untuk memperbaiki dan memprioritaskan masyarakat yang masuk dalam kategori miskin atau ekonomi lemah.

Kata Kunci: Apatisme, Pendaftaran Tanah, sertifikat Hak Atas Tanah

ABSTRACT

Saldin. Student ID. 221411064. 2017. *People's Apathy on Legal Awareness toward Land Certificate Ownership (critical analysis on the emergence of community's apathy and its influence toward legal awareness in processing their land certificate in Boludawa Village of Suwawa Sub-district, District of Bone Bolango through phenomenological Perspective)*. Skripsi, Principal supervisor is Dr. Jusdin Puluhulawa, SH., M. Si and Co-supervisor is Dr. Sastro M Wantu, SH., M. Si. Study Program of Civics Education, Department of Law and Society, Faculty of Social Science, State University of Gorontalo.

The problem statement in this study is how the legal awareness of the Boludawa village community in processing their land certificate, what are the obstacles which have made them become apathy in processing their land certificate is, and what are the efforts to solve this apathy in processing their land certificate. This study is a qualitative descriptive study with phenomenology approach. The data used in this research are primary and secondary data. The data were obtained from interview, observation, and documentation. The data are collected from samples which taken purposefully. The data are analysed using interactive model of data reduction, data display, and conclusion drawing.

This research reveals that law, in relation to land certificate processing is understood as tool to state their ownership of that land which acknowledged by the state. People understand this, however, further down on the technical aspects and consequences of land ownership, made them afraid to process their land certificate. Therefore, their legal awareness is considered low. The factors that impede them the processing of their land ownership certificate is the service factor, lack of information/socialization, economic factor, and the most important factor is the apathy attitude of the people which manifested through their carelessness on land ownership certificate. Law on land should be informed/socialize to the people considering their lack of legal awareness on the processing of land ownership certificate, as well as intensify the integrated socialization. National Program (PRONAS) is the solution to improve and prioritize those within poor people category to have their land ownership certificate.

Keywords: Apathy, Land Registration, Land Ownership Certificate

